BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu :

1. Kewenangan Balai POM Jambi dalam mengatasi peredaran obat sirup yang mengandung zat berbahaya di Kota Jambi termuat dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 yang secara khusus menguraikan wewenang BPOM. Hal tersebut antara lain melakukan penerbitan izin edar produk serta sertifikat selaras persyaratan dan standar keamanan, melaksanakan penyidikan maupun intelijen dalam BPOM, memberi sanksi administratif selaras aturan perundangan. Berlandaskan hal ini, bisa dilakukan pembersihan pada obat-obatan yang diedarkan baik mempunyai izin edar maupun tidak oleh Balai POM Jambi yang merupakan bagian dari BPOM RI. Upaya penegakan hukum yang dilaksanakan Balai POM Jambi bisa mengakibatkan sanksi antara lain berupa pemusnahan atau penarikan obat. Setelah itu, UU memberikan pilihan kepada masyarakat yang dirugikan untuk menuntut haknya melalui perdamaian, BPSK, atau pengadilan.
2. Tindakan pemerintah melalui BPOM dalam mengatasi peredaran obat sirup yang mengandung zat berbahaya dilakukan dengan memberikan perintah pada industri farmasi guna menarik obat sirup dari peredaran serta pemusnahan bagi semua bets produknya, mencabut izin edar obat sirupnya, menyetop produksi dan distribusinya, pencabutan Sertifikat CDOB serta mencabut sertifikat CPOB cairan oral non-betalaktam. Disisi

lain Balai POM Jambi yang merupakan bagian dari BPOM Republik Indonesia juga turut memberikan upaya dalam menangani kasus terkait dengan peredaran obat sirup yang mengandung zat berbahaya terkhususnya di Kota Jambi. Balai POM Jambi turun langsung ke lapangan yakni fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini apotek untuk memantau secara langsung terkait obat sirup yang dari awal dilakukan penyetopan jual beli hingga dilakukan penarikan dari peredaran beberapa obat sirup yang mengandung zat berbahaya di Kota Jambi.

B. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa saran antara lain :

1. Pemerintah lebih memperketat dalam menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai standar dan persyaratan keamanan, semakin intens dalam melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pemberian sanksi administratif yang lebih tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah, khususnya BPOM diharapkan lebih sering mengadakan pembinaan serta penyuluhan-penyuluhan kepada pihak industri farmasi sehingga dapat bekerja sama dengan baik dan mengikuti setiap aturan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas seperti BPOM tersebut agar tidak merugikan masyarakat maupun pihak nya sekalipun.